

KPK Panggil Lagi Dito Mahendra untuk Klarifikasi soal 15 Senjata Api

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil pengusaha Dito Mahendra terkait penemuan 15 pucuk senjata api yang petugas KPK melakukan pengeledahan di rumahnya, Senin (13/3) lalu.

Pengeledahan tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, perkara TPPU Nurhadi saat ini sedang berada di tahap penyidikan.

"Tentu nanti kami akan panggil kembali pada saatnya nanti," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (23/3).

Tim penyidik masih menganalisis dan dan berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait penemuan senjata api tersebut. Setelah KPK mengantongi data dan informasi mengenai senjata api itu, penyidik akan mengklarifikasi Dito.

"Sehingga kami memiliki banyak data dan informasi, baru lakukan klarifikasi," ujar Ali.

Tim penyidik KPK menemukan 8 senjata api laras panjang, 5 Pistol berjenis Glock, 1 Pistol S & W, dan 1 Pistol Kimber Micro. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengata-

kan, pihaknya tidak hanya menemukan senjata api, tapi juga sejumlah peluru tajam dan amunisi. Barang-barang itu berada di sebuah ruangan khusus di dalam rumah Dito yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Pada kesempatan itu-lah, saya kebetulan jg ada di sana, itu betul dalam sebuah ruangan (khusus) ditemukan ada 15 pucuk itu lengkap dengan amunisinya, senjata api, peluru tajam," kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (20/3).

Tim penyidik sedianya mencari obyek benda yang diduga milik Nurhadi dan dikuasakan kepada Dito. Dalam proses pengeledahan, penyidik memang harus melihat seluruh ruangan di rumah Dito. Secara tidak sengaja, penyidik kemudian menemukan senjata itu.

KPK kemudian menghubungi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Mabes Polri sebagai lembaga yang mengeluarkan izin kepemilikan senjata api. Temuan itu juga dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan karena locus atau tempat kejadian perkara (TKP) di kawasan Kebayoran Baru.

"Tentunya keberadaan senjata tersebut harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Polri," ujar Asep. ● **han**

Sidang AG yang Terlibat Kasus Penganiayaan D Digelar Tertutup

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menegaskan bahwa persidangan terhadap AG (15), tersangka kasus penganiayaan D (17) bakal digelar secara tertutup. Kepala Seksi Penerangan Hukum DKI Jakarta Ade Sofyan menjelaskan, sidang digelar tertutup karena AG masih berstatus anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum.

"Sidang di PN Jakarta Selatan. Untuk anak pastinya digelar secara tertutup ya," ujar Ade saat dikonfirmasi, Kamis (23/3).

Menurut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyanto, tidak ada persiapan khusus untuk menggelar sidang AG dalam kasus penganiayaan D. Dia hanya menyebutkan, sidang akan digelar sesuai pedoman Mahkamah Agung (MA) terkait penanganan perkara yang menarik perhatian publik.

"Tidak ada persiapan khusus, namun karena menarik perhatian publik tentu akan dilaksanakan ketentuan-ketentuan penanganan perkara yang menarik perhatian publik, sebagaimana pedoman yang telah ditentukan MA," ungkap Djuyanto.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan patuh dengan aturan terkait perlindungan anak dalam pelaksanaan sidang untuk AG.

"Untuk AG tentu dilaksanakan sebagaimana hukum acara yang berlaku pada anak yang berhadapan dengan hukum," ujarnya.

Berkas perkara AG telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan atau P21. AG juga secara resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

"Jadi pada hari ini anak berkonflik dengan hukum, yaitu AG, dinyatakan sudah lengkap berkasnya oleh jaksa penuntut umum (JPU), dan hari ini dilaksanakan penyerahan yang bersangkutan beserta barang buktinya kepada JPU," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarif Sulaeman Ahdhi.

Selama menunggu waktu sidang, kata Syarif, AG tetap ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Jakarta Selatan. AG akan ditahan selama lima hari ke depan di LPKS. Masa penahanan bisa diperpanjang tujuh hari jika surat dakwaan belum selesai disusun. ● **mei**

Pertama Kali, Gunung Merapi Mempunyai Dua Kubah Aktif

JAKARTA (IM) - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Badan Geologi mengungkapkan fakta BAHWA Gunung Merapi memiliki 2 kubah aktif dalam satu periode erupsi. Hal ini pertama kali dalam sejarah.

"Pertama kalinya dalam sejarah, Gunung Merapi memiliki 2 kubah lava aktif dalam satu periode erupsi. Kubah lava ini adalah kubah lava barat daya dan kubah lava tengah kawah. Pasca kemunculannya pada Januari 2021, kedua kubah lava saat ini masih terus tumbuh," ujar BPPTKG melalui akun media sosial, Kamis (23/3). Sebelumnya, Badan Geologi menerbangkan drone

untuk memetakan sebaran suhu di puncak Gunung Merapi setelah kejadian erupsi 11 Maret 2023.

"Hasil pemetaan menunjukkan kubah lava barat daya masih terlihat aktif ditunjukkan dengan suhu yang tinggi mencapai 230 derajat Celsius," ungkap BPPTKG.

Hasil foto udara juga menunjukkan batas material guguran secara lebih jelas. Tampak dua area panas pada bagian tengah dan bawah kubah diduga sebagai lokasi sumber guguran dan awanpanas guguran di sisi barat daya. Bagian selatan kubah barat daya (mengarah ke Sungai Boyong) juga masih tampak aktif. "Berbeda dengan kubah lava barat daya, suhu pada kubah lava tengah kawah tidak jauh berbeda dengan batuan di sekitarnya. Akan tetapi, terdapat titik panas di tepi timur kubah tengah kawah dengan suhu sebesar 114 derajat Celsius," katanya.

Sementara itu, kata BPPTKG, dari hasil pemetaan suhu ini menunjukkan bahwa dua kubah lava masih aktif. Suplai magma baik dari dalam maupun dangkal masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awanpanas guguran di daerah potensi bahaya. ● **mei**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



FESTIVAL DERMAGA KRI DEWARUCI MENYAPA WARGA

Foto udara KRI Dewaruci (kanan) dan KRI Makassar 590 (kiri) bersandar saat Festival Dermaga KRI Dewaruci Menyapa Warga di Dermaga Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/3). Festival yang digelar Pangkalan TNI AL (Lanal) Semarang tersebut diselenggarakan secara gratis untuk warga sebagai sarana edukasi dunia bahari melalui kapal perang sekaligus mengenalkan kapal latih legendaris KRI Dewaruci buatan tahun 1952 dan diluncurkan pada tahun 1953.

Setelah Nuduh KPK Beri Ubi Busuk, Kini Lukas Enembe Mogok Makan Obat

KPK menjamin kesehatan Lukas Enembe selama berada dalam tahanan. Termasuk pemenuhan pengobatan untuk Lukas Enembe. KPK juga selalu berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam pemenuhan kesehatan Lukas Enembe.

JAKARTA (IM) - Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE) (LE) kembali berula. Setelah menuduh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberinya makan ubi busuk, kini dia mogok minum obat.

Tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan proyek di Papua tersebut me-

nolak minum obat dari KPK dan bersikukuh ingin berobat ke Singapura.

Lukas dikabarkan telah menuduh pimpinan KPK terkait mogok minum obat yang diberikan dokter KPK agar bisa berobat ke Singapura. Namun, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron memastikan belum menerima surat dari

Lukas Enembe. Ghufron menegaskan bahwa tugas KPK hanya menjalankan proses penegakan hukum secara profesional.

"Perlu kami tegaskan, KPK adalah aparat penegak hukum sehingga tugasnya adalah menegakkan hukum secara profesional, KPK bukan lembaga penjamin sehatnya pasien termasuk dalam hal ini saudara LE yang sedang ditahan KPK," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Kamis (23/3).

Ghufron menekankan bahwa pihaknya telah menjamin kesehatan Lukas Enembe

selama berada dalam tahanan. Termasuk pemenuhan pengobatan untuk Lukas Enembe. KPK juga selalu berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam pemenuhan kesehatan Lukas Enembe.

"Pelayanan terhadap kesehatan saudara LE itu dikoordinasikan dengan IDI dan sejauh ini memandang sakitnya saudara LE masih dapat ditangani di dalam negeri. Mungkin lebih lanjut akan kami bahas bersama IDI berkaitan dengan perkembangan kesehatan yang bersangkutan untuk kami tindak lanjut," beber Ghufron.

Untuk diketahui, Lukas Enembe menolak minum obat dari dokter KPK. Salah satu kuasa hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattanya mengklaim obat yang diberikan dokter KPK tidak memberikan pengaruh perubahan terhadap kondisi kesehatan kliennya. Karena itu, kata Petrus, Lukas bersurat ke pimpinan KPK agar dapat berobat ke Singapura.

"Dalam Surat Pernyataan tersebut, Bapak Lukas Enembe menolak minum obat-obatan yang disediakan dokter KPK, karena tidak ada perubahan atas sakit yang dideritanya, sejak Bapak Lukas meminum obat yang disediakan dokter KPK. Dan buktinya kedua kaki klien saya juga masih bengkok sampai saat ini dan jalannya pun tertatih-tatih," ujar Petrus.

"Bapak Lukas Enembe meminta agar pengobatannya dilakukan di rumah sakit Singapura. Karena yang sangat paham dan mengerti akan

sakitnya Bapak Lukas Enembe adalah dokter-dokter di rumah sakit Mount Elisabeth Singapura," imbuhnya.

Lukas Enembe (LE) merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka suap bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL) oleh KPK.

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Rijatono ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Lukas diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan karena perusahaan Rijatono dimenangkan dalam sejumlah proyek pembangunan di Papua.

Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digelar. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 Miliar. Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.

KPK menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK juga sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi lainnya tersebut. ● **han**

Sahkan Perppu Ciptaker Menjadi UU, Buruh: DPR Hanya Jadi Stempel Pemerintah

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dinilai hanya sebagai stempel pemerintah setelah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengaku kecewa lantaran DPR RI mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya memerintahkan agar UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan.

"Indonesia kembali ke zaman Orde Baru, karena DPR RI hari ini ternyata hanya menjadi stempel bagi pemerintah. Bahkan, mengabaikan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan memerintahkan dilakukan perbaikan dalam dua tahun," kata Mirah dalam siaran pers, dikutip pada Kamis (23/3).

Pengabaian yang dilakukan DPR RI terhadap putusan MK secara tidak langsung telah mengabaikan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia. Terlebih, penerbitan Perppu Cipta Kerja sebelumnya juga dirasa tak ada kegentingan yang memaksa.

Penerbitan perppu tersebut juga dinilai menjadi bukti arogansi kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama DPR RI, yang semata-mata hanya ingin melindungi kepentingan pemodal.

Mirah juga mengatakan, tidak dibahasnya Perppu Cipta Kerja dalam sidang pertama sejak perppu diterbitkan membuktikan tidak adanya kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat formil penerbitan Perppu Cipta Kerja. "DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru tidak lagi memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia," kata Mirah menegaskan.

Menurutnya, isi Perppu Cipta Kerja yang telah disahkan tidak jauh berbeda dengan isi UU Cipta Kerja yang banyak merugikan kepentingan pekerja.

"Hilangnya kepastian jaminan pekerjaan, jaminan upah dan jaminan sosial dalam UU Cipta Kerja maupun dalam Perppu Cipta Kerja, akan menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

DPR RI sebelumnya mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi UU. Pengambilan keputusan terhadap Perppu Ciptaker diawali dengan pembacaan laporan Badan

Legislasi (Baleg) terkait hasil pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh Wakil Ketua Baleg M Nurdin.

Setelah itu, rapat paripurna sempat diwarnai hujan interupsi hingga aksi walkout. Fraksi Partai Demokrat tampak menginterupsi Puan yang mau mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi UU. Mereka menolak pengesahan Perppu Ciptaker menjadi UU.

Sementara itu, Fraksi PKS juga menggunakan hak mereka untuk melakukan interupsi. Bahkan, Fraksi PKS melakukan aksi walkout setelah menyuatkan interupsi mereka.

Meski mendapat respons demikian, Ketua DPR RI Puan Maharani tetap mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi UU.

"Selanjutnya, kami akan menayakan kepada setiap fraksi apakah rancangan UU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker jadi UU dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Puan.

"Setuju!" seru para hadirin.

"Terima kasih," kata Puan sambil mengetok palu. ● **han**



FOTO: ANT

SELEKSI CALON PPPK KEMENTERIAN AGAMA

Peserta calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama mengikuti seleksi kompetensi dengan Computer Assisted Test (CAT) di gedung Amel Convention, Banda Aceh, Aceh, Kamis (23/3). Sebanyak 74.424 peserta calon PPPK Kementerian Agama di seluruh Indonesia akan mengikuti seleksi sejak 17 Maret hingga 9 April 2023 untuk memperebutkan 49.549 formasi yang tersedia.

PENGUMUMAN

Dengan ini mengumumkan hasil dari Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbuka PT BINTANG EKAGUNA, yang dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BINTANG EKAGUNA ("Perseroan") dibuat secara dibawah tangan tanggal 18 Maret 2023, bermetarai cukup telah diputuskan untuk membubarkan Perseroan dan menunjuk Direksi selaku likuidator Perseroan.

Bagi Kreditor dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang mendukung kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini dimuat, dengan alamat:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jl. Rasuna Said Kavelling 6 - 7, Jakarta Selatan.

Jakarta, 24 Maret 2023
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Direksi dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INDO TRAKTAMA CEMERLANG berkedudukan di Jakarta Pusat tertanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan JAP SUN JAW, SH, Notaris di Jakarta, telah diambil keputusan, yaitu:

Menurunkan modal dasar perseroan dari semula sebesar Rp.6.296.400.000,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.3.898.800.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekaligus menurunkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp.6.296.400.000,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.3.898.800.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

Sehubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham diatas, maka apabila ada kreditor yang merasa keberatan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan tersebut diatas dengan menyampaikan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini. Demikian pengumuman ini disampaikan agar dapat dimaklumi.

Jakarta, 24 Maret 2023
PT. INDO TRAKTAMA CEMERLANG
Ttd
DIREKSI

INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 14 April 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

Kantor Cabang Pembantu Pekalongan

Jalan Tentara Pelajar No.1 Kandang Panjang, Jawa Tengah - 51142

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin Kantor Tegal (0285) 340100

Hormat Kami,
PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin